

Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi

Oleh Dr. Sinta Dewi Rosadi, SH, LL.M.

Ketua CyberLaw Centre, Fakultas Hukum, UNPAD

Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum, Komisi I DPR Republik Indonesia
1 Juli, 2020



POLITIK HUKUM

Prof. Padmo Wahyono

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk.



MEKANISME

Prof. Padmo Wahyono

01

Tujuan apa yang hendak dicapai dengan sistem hukum yang ada

02

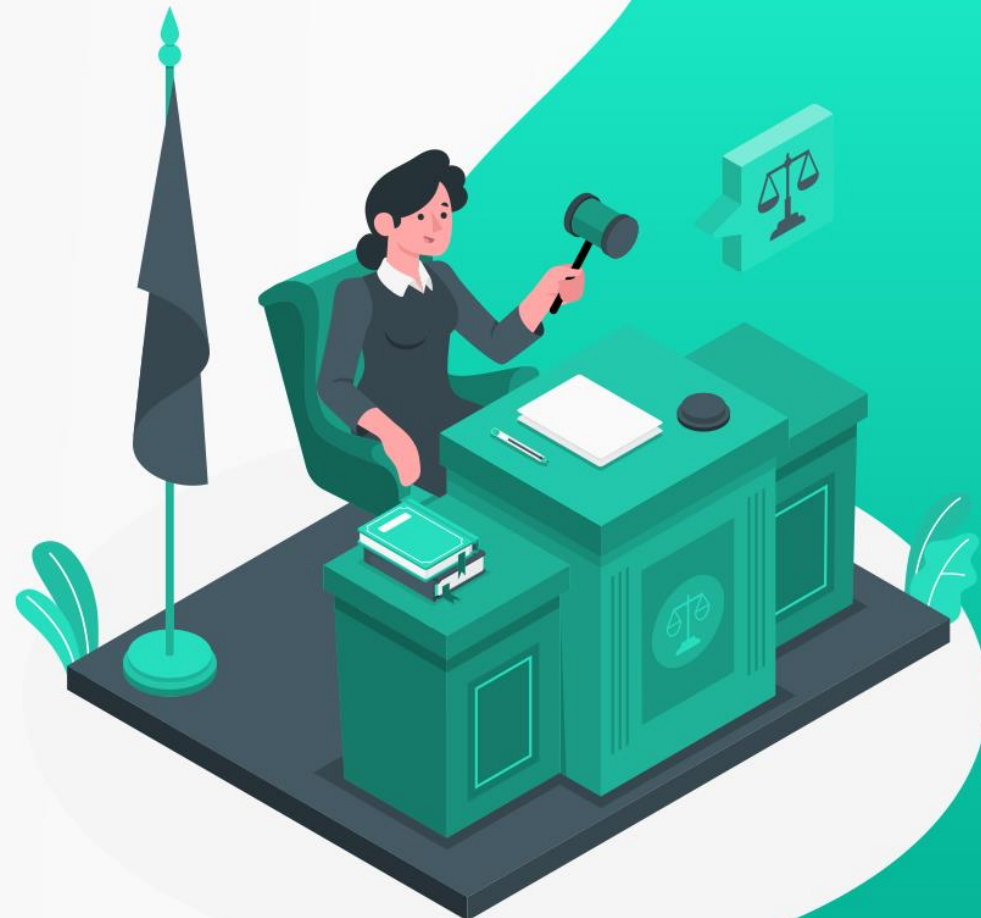
Cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut

03

Kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan

04

Dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik



Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja

- 01 HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN MASYARAKAT
- 02 HUKUM SEBAGAI MEKANISME UNTUK MERUBAH CARA BERFIKIR/MIDSET MASYARAKAT
- 03 MELALUI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI AKAN MERUBAH CARA BERFIKIR MASYARAKAT UNTUK LEBIH MENJAGA DATA PRIBADI



LANDASAN FILOSOFIS

- **NEGARA KESEJAHTERAAN/WELFARE STATE (PROF. KRANNEBURG)**
- *Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial”*
- *Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.”*

Keputusan Mahkamah Konstitusi

Putusan No 5/PUU-VIII/2010 tentang Perlunya suatu Undang-Undang Khusus yang mengatur Penyadapan.

Hak Privasi merupakan bagian penting dalam negara hukum moderen



JUDGE

Penerapan Welfarestate

5 Pilar

Demokrasi (Democracy),

Penegakan Hukum (Rule of Law),

Perlindungan Hak Asasi Manusia (The Human Right Protection),

Keadilan Sosial (Social Justice),

Anti Diskriminasi (Anti Discrimination).



Upaya Mewujudkan Negara Kesejahteraan

UUD 1945,

PASAL 28 AYAT G DAN Y

PEMENUHAN HAK DASAR WARGA NEGARA



Perlindungan Data Pribadi juga telah masuk prioritas dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokrat 2020-2024.

Merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

TRANSFORMASI DIGITAL

REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN EKONOMI DIGITAL

STRATEGI

MENJAMNIN KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI



Data Kebocoran Data Pribadi 2019

Business:

644 incidents (43.7%)

Health care/medical:

525 incidents (35.6%)

Education:

113 incidents (7.7%)

Banking/credit/financial:

108 incidents (7.3%)

Government/military:

83 incidents (5.6%)



Kasus **Ke bocoran** Data Pribadi Di Indonesia

-  Malindo
-  BukaLapak
-  Tokopedia
-  Situs KPU
-  Situs Polri



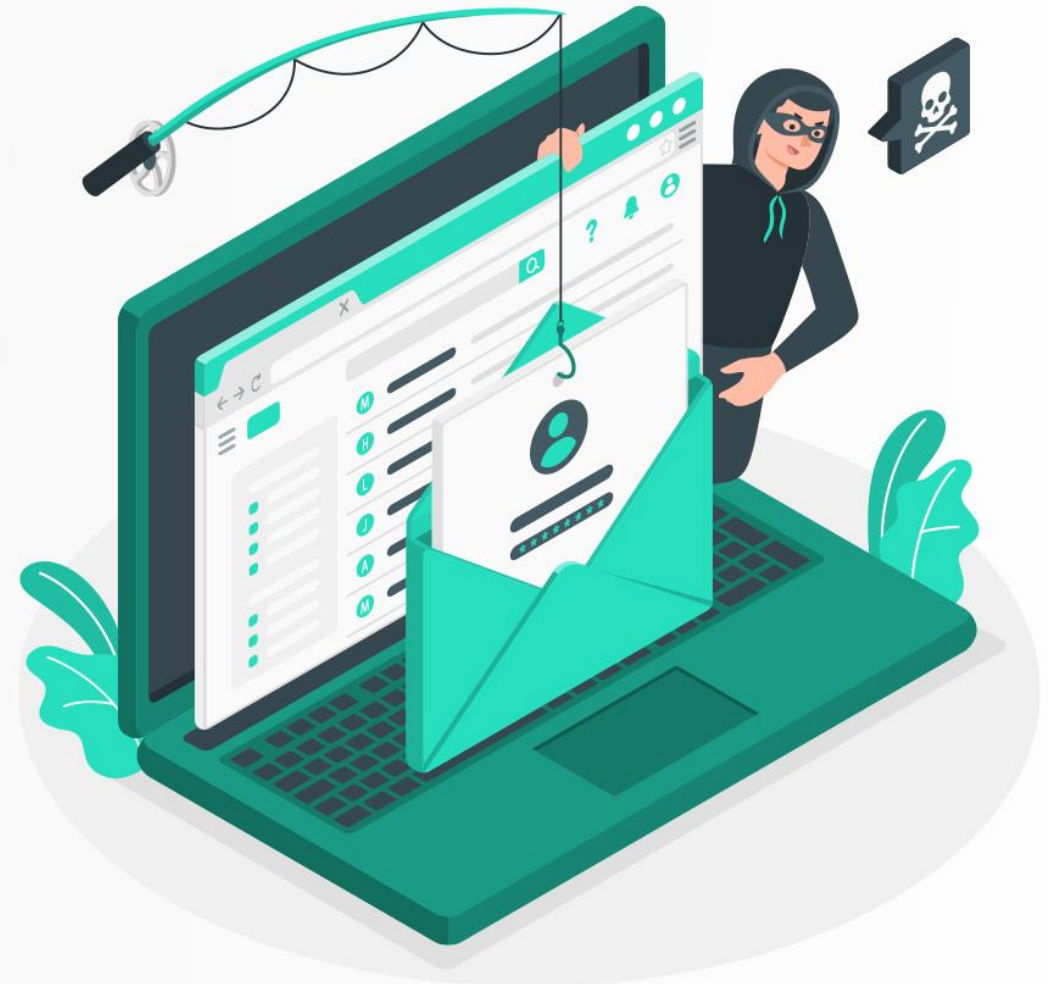
- PRINSIP MERUPAKAN PILAR UTAMA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
- SETIAP UU PDP NEGARA-NEGARA LAIN MENERAPKAN PENDEKATAN YANG HAMPIR SAMA
- POSISI PADA AWAL UNDANG-UNDANG
- SEMUA KEWAJIBAN KHUSUSNYA PENGENDALI DATA HARUS BERDASARKAN PADA PRINSIP-PRINSIP



Konsep Privasi dan Data Pribadi

Hak privasi adalah hak dasar yang telah diatur dalam banyak konstitusi di seluruh dunia, serta dalam hukum hak asasi manusia internasional.

Hak privasi sangat luas ruang lingkungnya



Definisi Privacy (Bygrave)

Non-interference

Information control

Limited accessibility

Intimate or sensitive



Cakupan Privacy (A. Munir)

TERRITORIAL PRIVACY

BODILY PRIVACY

COMMUNICATION PRIVACY

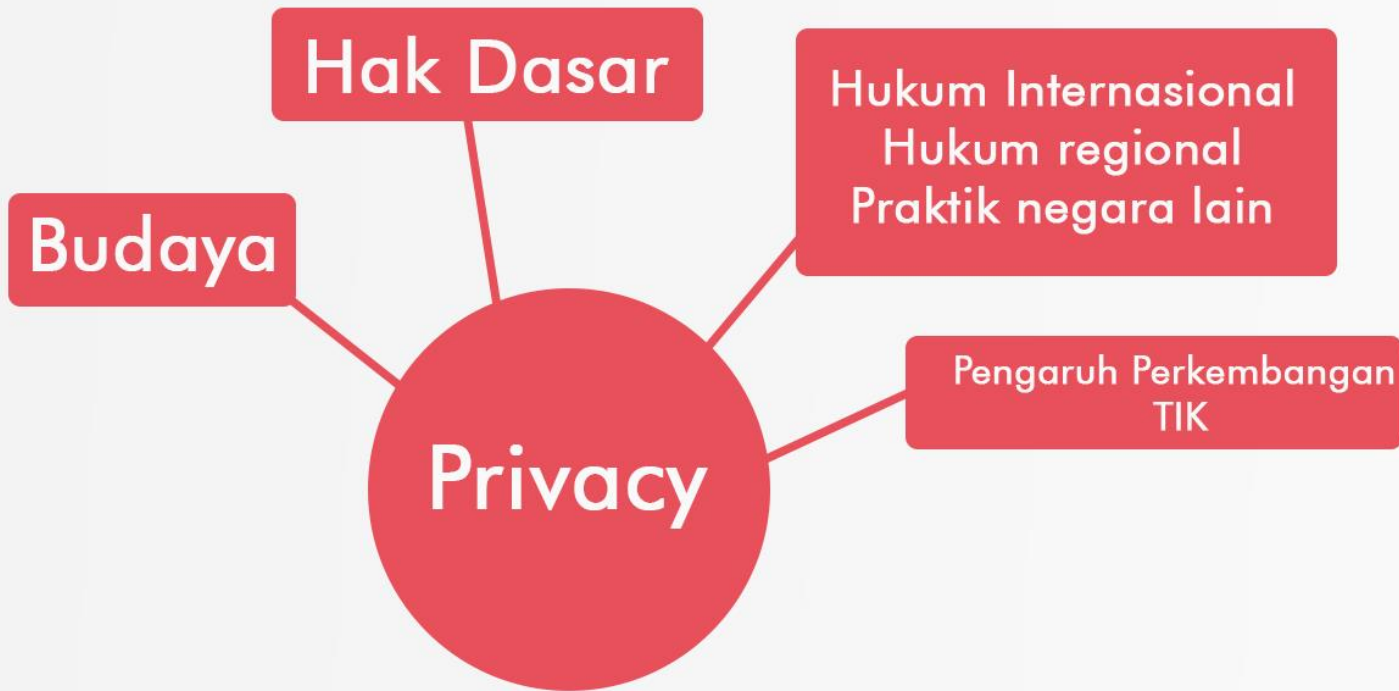
DATA/INFORMATION PRIVACY



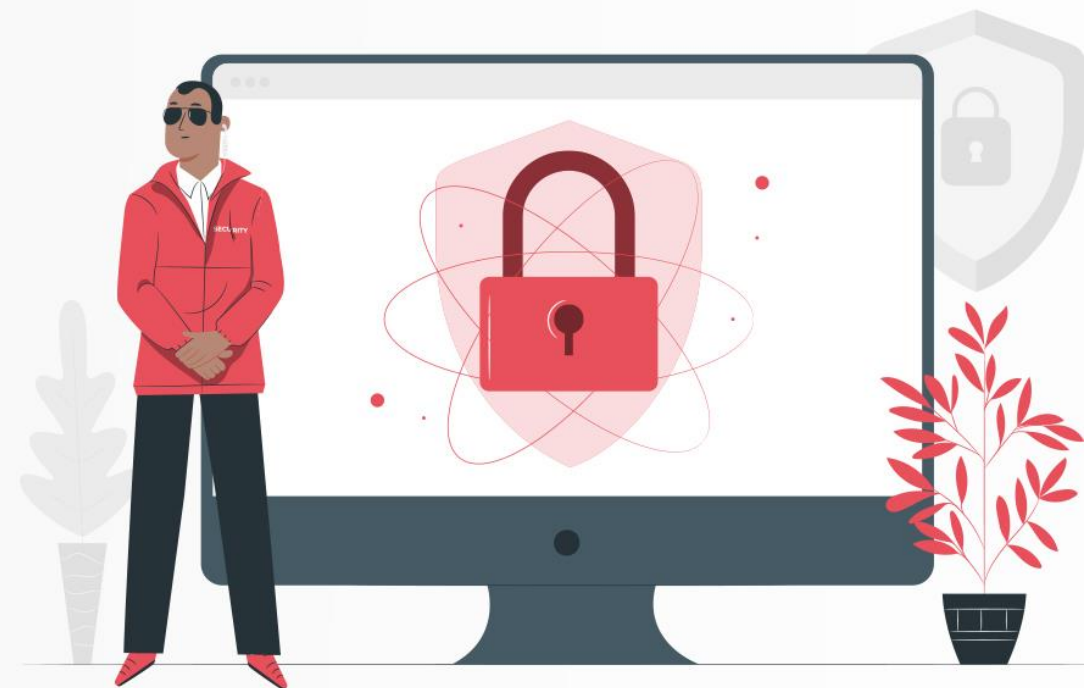
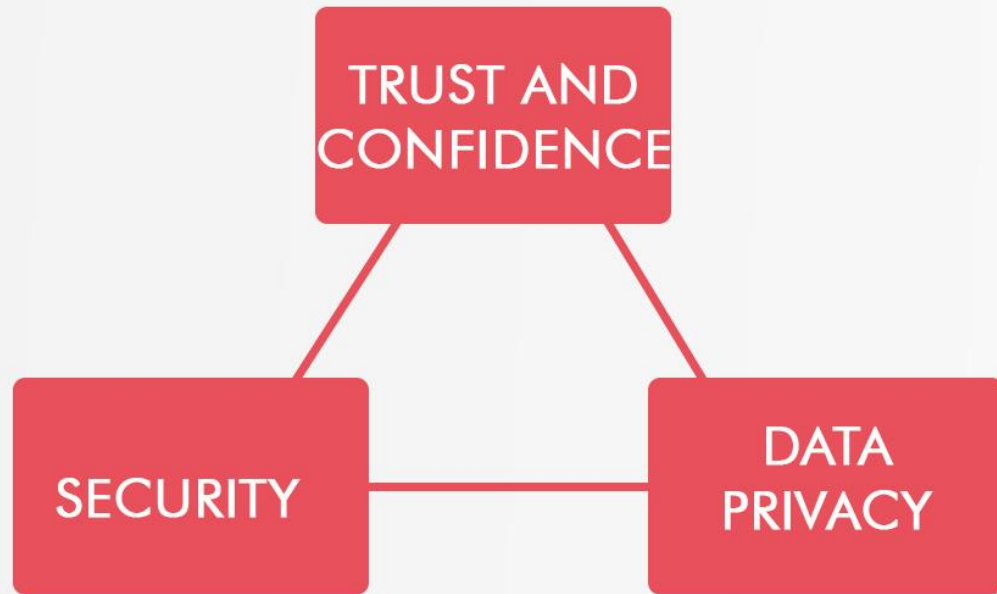
Data Negara yang telah *Memiliki Regulasi/ 120 Negara*

EU	Non EU	Asia	Afrika	Caribia	Amerika Latin	Timur Tengah	Amerika Utara	Austrasia	Central Asia	Pasific
28	26	20	20	10	15	06	02	02	20	0

Konsepsi Privacy

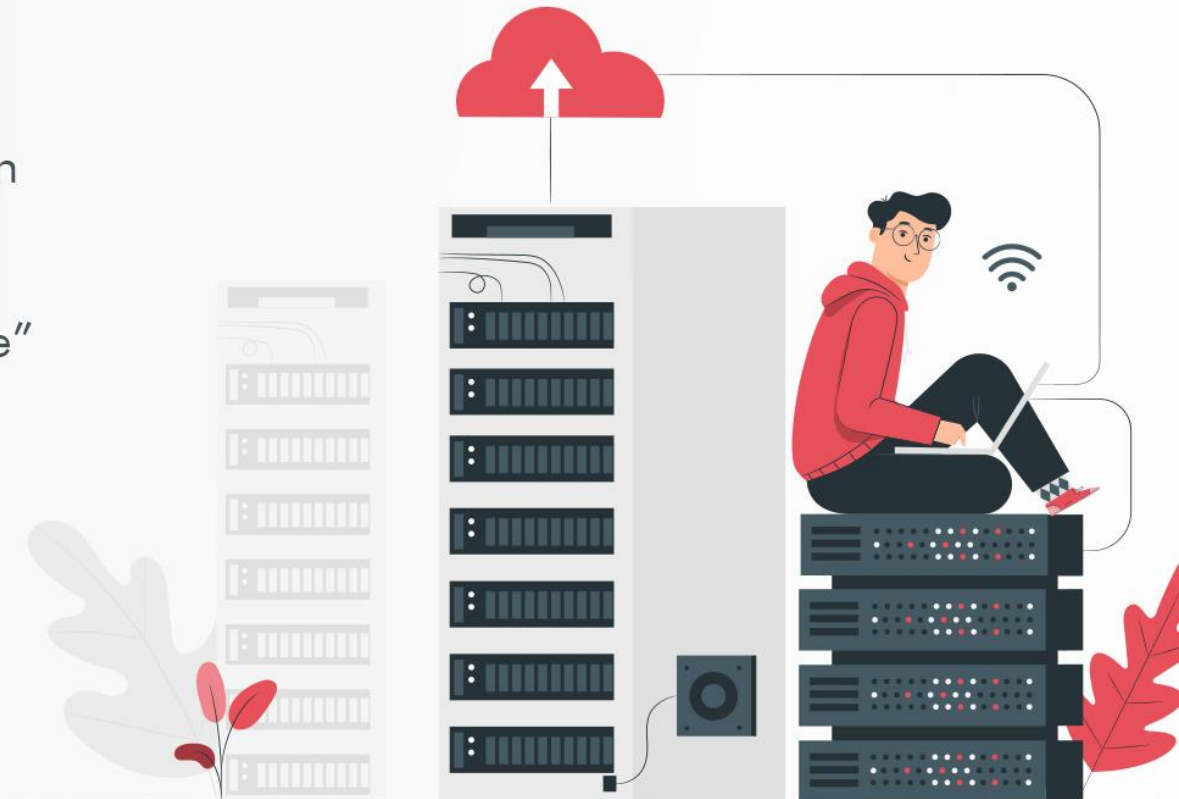


International Data Privacy Principles



Perkembangan Pengaturan PDP secara Internasional/2020

- 132 negara telah memiliki UU PDP baik secara Comprehensive maupun sektoral
- Beberapa negara melakukan amandemen dengan menyesuaikan dengan GDPR
- Jepang telah diakui oleh GDPR sebagai "Adequate"



Data Privacy International Global Standards

OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data, 1980

Council of Europe, Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, 1980

Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows, 2001

APEC Privacy Framework, 2004

Madrid Resolution (Data Privacy Commissioner), 2009

Perkembangan Data Privacy

Standalone Right

Salah Satu Jenis Privasi

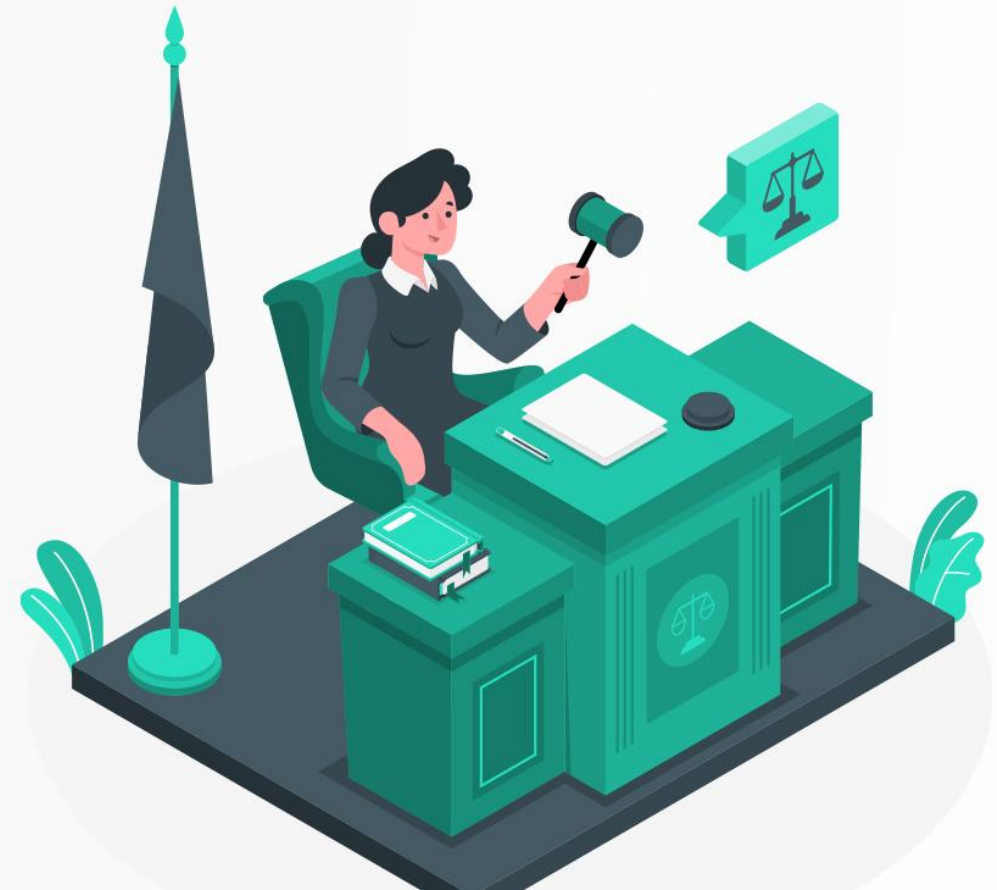


Undang-Undang Perlindungan Data

Membertikan kewenangan pada individu sejauhmana badan pemerintah dan perusahaan menjaga data pribadi individu

Memberi kewenangan individu mengawasi bagaimana data pribadi dikelola oleh institusi

Mengatur " data controller" / Pengendali data dan "data processor"/pemroses data bagaimana memproses data pribadi individu



Telah Tercipta Prinsip Perlindungan Data Global

- Lawful
- Specific purposes
- Data minimization
- Transparency and openness
- Security
- Accountability
- Remedy





Pengaturan yang sudah ada (Existing)

UUD 1945 ayat 28

UU ITE no. 11 tahun 2008 dan UU no. 19 tahun 2016

PP 71 /2019 dngn PSTE

PERATURAN KOMINFO NO. 20 TAHUN 2016



JUDGE

TERIMA KASIH



JUDGE